



**LAPORAN AKHIR  
KEGIATAN PENELITIAN PERGURUAN TINGGI**

**PENGARUH PENGUASAAN LAHAN SAWAH  
TERHADAP DISTRIBUSI PENDAPATAN  
(Kasus Di Kabupaten Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah)**

Oleh :  
**Purbayu Budi Santosa, MS., dkk**  
**Fakultas Ekonomi**  
**Universitas Diponegoro**

---

**Dibiayai oleh Proyek Pengkajian dan Penelitian Ilmu Pengetahuan Terapan  
sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Peneliti Muda  
Nomor : 064/P21PT/DPPM/LITMUD/V/1997,  
Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat,  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan**

## HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Pengaruh Penguasaan Lahan Sawah Terhadap Distribusi Pendapatan (Kasus di Kabupaten Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah)
2. Lokasi Penelitian : Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah
3. Pelaksana Penelitian :
  - a. Ketua : Purbayu Budi Santosa, MS
  - b. NIP : 131629774
  - c. Pangkat/Jabatan : Penata Muda Tingkat I/Lektor Muda
  - d. Anggota Peneliti : 2 (dua) orang
4. Jangka Waktu Penelitian : 9 (sembilan) bulan
5. Dibiayai Melalui Proyek : Pengkajian dan Penelitian Ilmu Terapan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
DIP Nomor 172/XXIII/3/1997  
Tahun Anggaran 1997/1998

Semarang, 24 Januari 1998

Menyetujui  
Dekan Fakultas  
Universitas

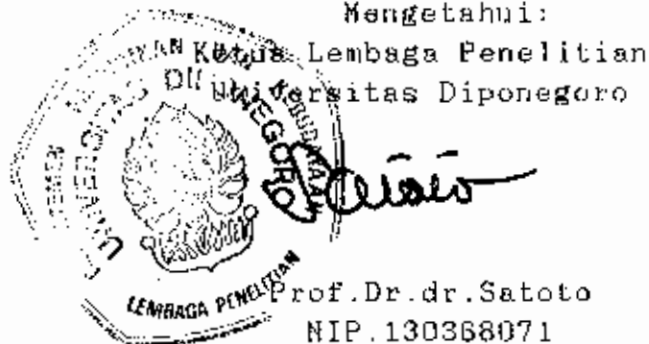


Prof. Dr. Suyudi Mangunhardjo  
NIP. 130324151

Ketua Peneliti,

Purbayu Budi Santosa, MS  
NIP. 131629774

Mengetahui:



Prof. Dr. dr. Satoto  
NIP. 130368071

## RINGKASAN

Tujuan penelitian ini ingin melihat pengaruh status penguasaan lahan terhadap distribusi pendapatan. Status penguasaan lahan dibagi menjadi petani pemilik penggarap, penyewa dan penyakap.

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Dati II Banjarnegara sebagai salah satu penghasil padi yang potensial di Propinsi Jawa Tengah. Data yang dipergunakan adalah data yang berasal dari penelitian lapangan untuk musim kemarau 1996.

Model yang digunakan untuk distribusi pendapatan fungsional adalah pendekatan metode akuntansi dan fungsi produksi Cobb-Douglas, sedangkan untuk distribusi pendapatan personal dihitung memakai indeks Gini.

Dilihat dari distribusi pendapatan fungsional, baik petani pemilik, penyewa dan penyakap belum dapat mencapai tingkat optimal dalam usahatani, karena belum dapat dicapainya kesamaan antara tingkat pendapatan relatif dengan elastisitas produksi.

Ketimpangan dalam distribusi pendapatan personal baik secara keseluruhan maupun antar status penguasaan lahan baik pendapatan berasal dari padi maupun pendapatan secara total termasuk dalam ketimpangan sedang, terkecuali untuk petani penyakap yang termasuk ketimpangan rendah. Meskipun begitu, distribusi

pendapatan personal lebih merata pada pendapatan total petani apabila dibandingkan dengan pendapatan petani dari padi.

Tingkat kemiskinan petani pada keseluruhan status penguasaan lahan mengalami penurunan apabila pendapatan petani dihitung dari total pendapatan dan dibandingkan dengan pendapatan petani yang hanya berasal dari usahatani padi.

## SUMMARY

The purpose of this study was to know the effect of land tenure status to income distribution. Land tenure status was divided by owner operator, renter and share-cropper operators.

The reseach was done in Banjarnegara Regency as one of the potential paddy farm in Central Java. One shot field-survey was to know the performance of dry season farming at 1996.

The economic model used for the functional income distribution was accounting method approach and Cobb-Douglas production function, while personal income distribution was calculated by Gini ratio index.

Rice farm owner, renter and share-cropper operators in functional income distribution perspective didn't reach optimal in farming because they didn't similar the degree of relative share and production elasticity.

In personal income distribution with the uotal income or from paddy farm income in all farmers or in the different land tenure status were indicate in medium disparity, except in share-cropper operators was indicate in soft disparity. Nevertheless, personal income distribution was equality in total income if it compare with paddy fam income.

The level of poverty of all land tenure status were decrease if income account with total compare another income from paddy farm. The reseach found that the increasing of disparity tends to increase of the level of farmer poverty.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas dapat diselesaikannya laporan penelitian ini. Penelitian dengan judul "Pengaruh Penguasaan Lahan Sawah Terhadap Distribusi Pendapatan (Kasus di Kabupaten Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah)".

Atas dapat terselesaikannya kegiatan penelitian ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Pimpinan dan staf Direktorat Binlitabmas, Ditjen Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Rektor Universitas Diponegoro, khususnya Ketua Lembaga Penelitian, atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk melakukan penelitian.
3. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, atas kemudahan dan dorongan kepada staf pengajar dalam melakukan kegiatan penelitian.
4. Ketua Bappeda Tingkat I Jawa Tengah dan Kabupaten Dati II Banjarnegara, atas ijin penelitian yang diberikannya, dan
5. Para pimpinan dan staf pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Banjarnegara, yang telah membantu penelitian ini.
6. Para responden yang dengan tekun dan kesabaran tinggi menjawab segala hal yang ditanyakan.

Kami menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, segala saran dan kritik membangun demi perbaikan dan penyempurnaan laporan penelitian ini, kami terima dengan hati terbuka. Akhirnya kami berharap semoga laporan penelitian ini dapat memberikan kegunaan bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Semarang, 24 Januari 1998  
Tim Peneliti

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul .....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Ringkasan .....	!iii
Summary .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Tabel .....	ix
BAB I:       PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang Penemitan .....	1
1.2. Qermasalahan Penelitian .....	6
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
BAB II:     TINJAUAN PUSTAKA .....	8
2.1. Teori Bagi Hasil pada Status Penguasaan Lahan .....	8
2 2. Distribusi Pendapatan .....	11
BAB III:    METODE PENELITIAN .....	17
3.1. Jenis dan Sumber Data .....	17
3.2. Sancangan Penarikan Sampel .....	18
3.3. Model Pendekatan .....	19
3.4. Alat Analisis dan Variabel Penelitian .	19

BAB IV:	HASIL DAN PEMBAHASAN .....	22
	4.1. Pemilikan dan Penguasaan Lahan ....	22
	4.2. Biaya dan Pendapatan Usahatani .....	25
	4.3. Pendapatan Total Petani .....	28
	4.4. Distribusi Pendapatan Fungsional .....	30
	4.5. Distribusi Pendapatan Personal!.....	45
	4.6. Tingkat Kemiskinan pada Petani .....	48
BAB V:	KESIMPULAN DAN SARAN .....	51
	5.1. Kesimpulan .....	51
	5.2. Saran .....	53
DAFTAR PUSTAKA .....		55



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Pemerintah bersama-sama masyarakat Indonesia telah berhasil menyelesaikan Pembangunan Jangka Panjang (PJP) I, yang dimulai dari Pelita I sampai V. Pada tanggal 1 April 1994 Indonesia memasuki Pelita VI sebagai langkah awal dimulainya PJP II. Sesuai dengan komitmen politik yang telah dikeluarkan, PJP II sebagai tahap atau era tinggal landas.

Akumulasi pembangunan yang telah dilaksanakan dengan intensitas tinggi semenjak awal Pemerintahan Orde Baru, telah pula menghasilkan berbagai kemajuan. Pada tahun 1967 ketika pembangunan secara besar-besaran baru saja dimulai, pendapatan per kapita masyarakat Indonesia masih sekitar 60 dollar Amerika Serikat per tahun, dan menjelang akhir PJP I pendapatan per kapita itu telah meningkat menjadi sekitar 600 dollar Amerika Serikat per tahun. Dengan kata lain, dalam waktu 26 tahun telah terjadi kenaikan pendapatan per kapita sekitar 1000 persen, atau rata-rata per tahunnya terjadi kenaikan pendapatan per kapita sekitar 38,5 persen. Pertumbuhan ekonomi yang berhasil dicapai selama PJP I rata-rata berkisar antara 5 sampai 7 persen per tahun. Jika dilihat dari Indeks Mutu Kehidupan Fisik (*Physical Quality of Life Index / PQLI*) sebagai salah satu indeks untuk

mengukur prestasi pencapaian kebutuhan pokok (*basic needs*), makin menunjukkan hasil yang baik. Pada tahun 1971 angka PQLI sebesar 49, tahun 1980 menjadi 59 dan pada tahun 1985 menaik lagi menjadi sebesar 72 (Sjahrir, 1986; 1992).

Jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan mengalami penurunan, di mana menurut Biro Pusat Statistik (BPS) pada tahun 1990 tinggal 27,2 juta orang atau sekitar 15 persen dari jumlah seluruh penduduk. Sebelumnya pada tahun 1987 terdapat 30 juta orang dan tahun 1978 terdapat 54,2 juta orang. Dalam waktu kurang lebih 14 tahun telah turun jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan sebesar 27 juta orang, atau rata-rata 1,9 juta orang lebih per tahunnya.

Pembangunan yang telah dilaksanakan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, pada tahap-tahap awal biasanya mengakibatkan ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Pendapat seperti ini telah dikemukakan oleh antara lain Kuznets (1955), Ahluwalia (1974) dan Paukert (1973). Chenery dan Syrquin (dikutip dalam Thee Kian Wie, 1983) maupun Ahluwalia, menyatakan membesarnya ketimpangan dalam distribusi pendapatan dialami selama masa transisi dari tingkat Pendapatan Nasional Bruto (*Gross Nasional Product*) per kapita US\$ 75 sampai tingkat GNP per kapita US\$ 750. Dalam kasus pembangunan yang dilakukan Indonesia tidak terdapat suatu kesepakatan dalam hal distribusi pendapatan semakin membaik atau justru mengalami kemerosotan.

Pendapat yang menyatakan tidak terjadi kemerosotan dalam distribusi pendapatan, seperti dikemukakan oleh King dan Weldon

(1975), di mana angka indeks Gini untuk daerah pedesaan Jawa tahun 1964 - 1965 sebesar 0,328 dan tahun 1966 - 1970 sebesar 0,309. BPS (dikutip dari Bappeda Tingkat I dan Kantor Statistik Jawa Tengah, 1993) menyatakan angka indeks Gini untuk daerah kota dan desa di Indonesia pada tahun 1978 sebesar 0,38 dan pada tahun 1990 sebesar 0,32. Angka indeks Gini untuk daerah kota dan desa pada tahun 1978 masing-masing sebesar 0,38 dan 0,34; sedang untuk tahun 1990 masing-masing sebesar 0,34 dan 0,25. Gupta (1977) dengan memakai berbagai model ekonometrika, mengemukakan distribusi pendapatan akan mengalami perbaikan seandainya Pemerintah ikut campur tangan dalam berbagai programnya yang bertujuan untuk mencapai pemerataan. Pendapat serupa dikemukakan pula oleh Tinbergen (1975) dan Nurimansyah Hasibuan (1993).

Di sisi lain, pembangunan yang telah dilakukan di Indonesia telah menghasilkan kemerosotan dalam distribusi pendapatan dikemukakan antara lain oleh Hendra Esmara (dalam Hananto Sigit, 1980), terutama di daerah perkotaan. Angka indeks Gini untuk daerah kota di Indonesia tahun 1970 dan 1976 masing-masing sebesar 0,3265 dan 0,3680; sedang untuk daerah pedesaan masing-masing sebesar 0,3387 dan 0,3043. Angka indeks Gini untuk daerah kota di Jawa-Madura pada tahun 1967, 1970 dan 1976 masing-masing sebesar 0,3006; 0,3319 dan 0,3976; sedang untuk daerah pedesaan masing-masing sebesar 0,2567; 0,2977 dan 0,2955. Gupta mengemukakan distribusi pendapatan akan mengalami ketimpangan apabila Pemerintah tidak ikut campur untuk memperbaiki pemerataan dalam hasil-hasil pembangunan. Seandainya Pemerintah tidak turut

campur, angka indeks Gini pada tahun 1971 sebesar 0,422, tahun 1985 menaik menjadi 0,545 dan tahun 1987 sebesar 0,561. Suharsono Sagir (1993) menyatakan *social gap* antara golongan kaya dan miskin semakin membesar dari Pelita I sampai V.

Menghadapi silang pendapat apakah pembangunan yang telah dilakukan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi telah menghasilkan perbaikan dalam distribusi pendapatan atau justru makin memerosotkan, maka diperlukan penelitian lebih lanjut. Pendapat seperti ini telah pula dikemukakan oleh Sumitro Djojohadikusumo pada Sidang Pleno ISEI keenam di Bukit Tinggi (dikutip oleh Nurimansyah Hasibuan, 1993), di mana penelitian-penelitian dalam masalah-masalah kesenjangan pembagian pendapatan seyogianya mendapat prioritas di masa datang.

Ketidakseragaman pendapat mengenai akibat pengaruh pembangunan terhadap distribusi pendapatan, dapat dikemukakan juga dalam sektor pertanian; yang secara khusus banyak berkaitan dengan pelaksanaan revolusi hijau. Irlan Soejono (1977) sebagai contoh, mengemukakan akibat diadakannya revolusi hijau (khususnya dalam bibit padi) mengakibatkan perbaikan dalam distribusi pendapatan petani, meski masih pada tingkat yang cukup tinggi. Penelitian yang dilakukan pada beberapa desa di Jawa Tengah pada usaha tani padi sawah, telah menemukan besarnya angka indeks Gini pada tahun 1968/1969 sebesar 0,533 dan pada tahun 1973/1974 menurun menjadi 0,495. Faisal Kasrino, *et al* (1981) dalam penelitiannya pada beberapa desa di Jawa Barat, menemukan indeks Gini distribusi kepemilikan tanah untuk desa Mariuk adalah 0,87 dan

untuk desa Jatisari dan Sentul masing-masing 0,71 dan 0,60. Tim peneliti tersebut juga mengemukakan indeks Gini untuk luas tanah garapan di Sentul adalah 0,585, di Jatisari 0,661, di Mariuk 0,866 dan di desa Balida sebesar 0,778. Penulis lain seperti Rukmadi Warsito (1982) dan Ihalauw, *et al* (1985) menyatakan distribusi pendapatan pada pertanian semakin senjang, karena baik pemilikan dan penguasaan tanah yang semakin senjang pula. R.S. Sinaga dan B.M Sinaga (1978) dengan menggunakan pendekatan *accounting* telah mengevaluasi pengaruh pelaksanaan revolusi hijau, khususnya perubahan teknologi terhadap pembagian pendapatan diantara pemilik faktor produksi dan diantara faktor produksi. Hasil penelitiannya menunjukkan pendapatan relatif (*relative share*) petani penggarap naik sebesar 16 persen setelah dilakukan pengenalan (introduksi) bibit padi unggul, sedangkan pendapatan relatif tenaga kerja upahan mengalami penurunan 15 persen.

Permasalahan lahan menjadi problematik yang cukup serius, khususnya yang dialami di Pulau Jawa. Akumulasi pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi, sementara luas tanahnya relatif tetap, mengakibatkan luas rata-rata pemilikan tanah semakin kecil. Sinaga dan White (1979) menyatakan satuan usahatani rata-rata seluas 0,63 hektar, dengan jumlah petani kecil sekitar 9 juta orang. Hasil Sensus Pertanian tahun 1983 menunjukkan bahwa rata-rata luas lahan per rumah tangga adalah sebesar 0,60 hektar. Penguasaan lahan yang relatif kecil ini dianggap tidak mencukupi lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga petani yang ada di

pedesaan (Ihalauw, *et al*, 1985). Padahal pada tahun 1930-an jumlah pemilik tanah garapan masih sekitar 4 juta orang dengan luas tanah sekitar 1,8 hektar (Egbert de Vries, 1985).

Penguasaan lahan pertanian yang ada di daerah pedesaan, tentunya akan berpengaruh terhadap distribusi pendapatan, baik itu distribusi pendapatan personal maupun fungsional. Besarnya skala penguasaan lahan bagi petani merupakan akses seseorang terhadap kemampuan untuk untuk memperoleh sumber-sumber pendapatan, termasuk pendapatan dari luar sektor pertanian.

## 1.2. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang, maka masalah yang ada dapat dirinci menjadi sebagai berikut:

- (1). Bagaimana pola penguasaan lahan sawah yang terdapat di daerah pedesaan.
- (2). Bagaimana penguasaan lahan sawah yang berbeda terhadap distribusi pendapatan fungsional dan personal.
- (c). Bagaimana keterkaitan antara tingkat ketimpangan dalam distribusi pendapatan (personal) dengan tingkat kemiskinan yang terjadi.

### 1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh status penguasaan lahan terhadap distribusi pendapatan di daerah pedesaan. Secara lebih rinci, penelitian ini bertujuan untuk:

- (1). Mengetahui pola penguasaan lahan sawah yang terdapat di daerah pedesaan.
- (2). Mengetahui pengaruh penguasaan lahan sawah yang berbeda terhadap distribusi pendapatan fungsional dan personal.
- (3). Mengetahui keterkaitan antara tingkat ketimpangan dalam distribusi pendapatan (personal) dengan tingkat kemiskinan yang terjadi di daerah pedesaan.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai bahan masukan bagi para pengambil kebijaksanaan sektor pertanian dan pedesaan, dalam rangka melakukan penanganan masalah kelembagaan penguasaan lahan dan persoalan distribusi pendapatan.